



Pacu IPM dan Ekonomi Kalbar

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) tetap akan fokus pada tiga sektor pembangunan yang selama ini sudah dijalankan, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Hal tersebut tergambar dari

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar Tahun 2023, Kamis (7/4).

◆ Ke F: laman 7 kolom 1

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan terus digenjot demi memacu percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pertumbuhan ekonomi. "Di 2023 fokus saya itu saja sebetulnya," ungkapnya saat diwawancara usai kegiatan Musrenbang RKPD yang mengusung tema 'Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Produktivitas Daerah dan Daya Saing' itu.

Ia melanjutkan, Pemprov juga berupaya mendorong sebanyak mungkin kegiatan ekspor melalui pintu ekspor di Kalbar. Dengan demikian, tampilan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini bisa semakin baik.

"Tahun depan (2023) itu bauksit akan dilarang untuk diekspor mentah sehingga pengganti eksportnya itu harus tercatat di sini, salah satunya CPO (Crude Palm Oil)," katanya.

Midji, sapaan karibnya, menjelaskan, saat ini produksi CPO di Kalbar per tahunnya bisa mencapai sekitar lima juta ton. Dari jumlah tersebut ternyata yang eksportnya tercatat di Kalbar baru sekitar satu juta ton. Sementara sisanya sekitar empat juta ton diekspor melalui pelabuhan atau pintu ekspor luar Kalbar, seperti Provinsi Lampung

dan Riau.

Optimalisasi jumlah ekspor CPO lewat pintu Kalbar dianggap sangat penting. Tujuannya untuk mengimpor bagi ekspor bauksit yang pasti akan menurun setelah tak boleh lagi diekspor dalam bentuk mentah. Saat ini, dikatakan dia, nilai ekspor CPO dan turunannya sudah bisa mencapai di atas 400 juta USD. Sedangkan untuk bauksit selama ini nilainya mencapai sekitar 600 jutaan USD.

"Nah, kalau ekspor bauksit mentahnya hilang, pasti tinggal kurang lebih 200-250 jutaan USD, sehingga ada defisit 350 jutaan USD. Itu yang harus ditutupi dari ekspor CPO yang harus tercatat di Kalbar," ujarnya.

Satu-satunya harapan untuk mewujudkan ini adalah dengan pengoperasian Pelabuhan Internasional Kijing secara penuh. Sebab saat ini pintu ekspor CPO melalui pelabuhan di Kabupaten Mempawah itu masih terbatas. Sedangkan Kalbar sendiri tidak memiliki pelabuhan lain yang berfungsi sebagai pintu ekspor.

"Mudah-mudahan tahun ini Kijing diresmikan, sehingga jadi pintu ekspor yang maksimal. Hanya masalahnya Pelabuhan Kijing belum punya tangki timbun, sehingga kapal dengan bobot 300 ribu DWT itu harus diisi melalui truk tangki dan itu akan lamban," terangnya.

Tak hanya CPO, dengan adanya Pelabuhan Kijing, Midji juga ingin agar ada peningkatan ekspor untuk komoditas pertanian dan produk-produk olahan lainnya. Karena ketika pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan itu diresmikan maka akan ada efek ikutan berupa pembangunan kawasan industri di sekitarnya. "Terlebih letak Pelabuhan Kijing sangat strategis ke negara (tujuan) ekspor Indonesia," paparnya.

Pada intinya, Midji menyebutkan beberapa target yang harus dicapai di tahun 2023 mendatang. Seperti tingkat kemiskinan Kalbar yang kini sudah menurun menjadi 6,84 persen, diperkirakan hingga akhir 2022, angkanya bisa dibawah 6,5 persen. "Lalu pada 2023 kita (Pemprov) targetkan (angka kemiskinan) berada pada angka 6,1 (persen). Bila perlu bisa di bawah angka tersebut," harapnya.

Selain angka-angka tersebut, perbaikan di tahun 2023 juga diharapkan fokus pada peningkatan kualitas hidup. Seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan angka harapan hidup dan angka lama sekolah, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Kemudian tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa men-

capai di atas lima persen, tingkat pengangguran terbuka 5,4 hingga 3,9 persen dan gini ratio harus di bawah 0,318.

Di samping itu, Pemprov pun akan berupaya menurunkan tingkat kematian ibu dan anak, termasuk angka stunting di masyarakat. "Angka stunting kita (Kalbar) cukup tinggi yakni 29 persen. Ini juga harus menjadi perhatian agar ke depan tidak menjadi masalah," ucapnya.

Untuk prioritas sektor pendidikan di tahun 2023, Pemprov bakal melanjutkan pemberian biaya pendidikan tingkat SMA/SMK negeri, melanjutkan pembangunan sekolah baru tingkat SMA/SMK, dan meningkatkan kualitas pendidikan angkatan kerja melalui sertifikasi keahlian.

"Fasilitas gedung yang telah selesai bisa digunakan untuk pelatihan dan workshop untuk memenuhi kebutuhan keahlian di Kalbar," tambahnya.

Di sektor kesehatan, Midji meminta dinas kesehatan provinsi bisa bersinergi dengan seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota agar bisa membangun sarana prasarana kesehatan dan rumah sakit untuk pelayanan yang lebih baik. "Jadi, ketika ada rujukan ke RSUD Soedarso harus sudah lebih nyaman," ucapnya.

Sedangkan di sektor infrastruktur, ia merasa perlu



terus meningkatkan kualitas jalan provinsi. Meski progresnya lamban, ia ingin kualitas yang terbaik. Upaya peningkatan jalan tidak akan menggunakan metode atau cara yang asal mengejar capaian perbaikan, tetapi kualitasnya harus lebih diperhatikan.

"Kami harus menjawab kebutuhan daerah yakni angkutan di atas 12 ton. Selama ini, daya dukung jalan kita hanya delapan ton sehingga ke depan harus ditingkatkan menjadi di atas 12 ton," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalbar Sukaliman dalam laporannya mengungkapkan, dalam rangka penyusunan RKPD, sesuai arahan gubernur, mulai tahun ini pemprov mencoba menggunakan konsep money follow program. Selain

itu, pemerintah bakal fokus pada peningkatan IPM dan infrastruktur.

"Oleh karena itu, kami coba mengubah pola, dari forum OPD menjadi forum lintas OPD dengan tujuan agar bisa fokus kepada target sasaran," ujarnya.

Sedangkan untuk kebijakan dengan konsep money follow program, menurutnya telah dicoba pelaksanaannya dengan tidak menyusun anggaran berdasarkan pagu yang diberikan. Bappeda hanya menghimpun dari seluruh perencanaan, baik dari tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, serta usulan ke tingkat nasional.

Usulan tidak menggunakan pagu tetapi bagaimana program-program yang disusun ditajamkan, selanjutnya ditentukan sesuai

prioritas untuk peningkatan IPM.

"Kami juga telah melakukan musrenbang kabupaten/kota yang juga diarahkan untuk menysasar IPM di masing-masing daerah. Karena IPM ini baik itu provinsi maupun nasional merupakan agregasi dari kabupaten/kota. Oleh karena itu, kami sepakat untuk tahun 2023 menysasar kepada priorotas IPM dan infrastruktur," tutupnya.

Adapun Musrenbang RKPD Kalbar Tahun 2023 ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono, Anggota Komisi II DPR RI Cornelis, jajaran Forkopimda Kalbar dan beberapa kepala perangkat daerah beserta seluruh bupati/wali kota se-Kalbar. (bar)